



# **RENCANA KERJA TAHUN 2022**

**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)  
KOTA YOGYAKARTA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah untuk tahun 2022.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun berikutnya.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, guna lebih meningkatkan

keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, fokus pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta melanjutkan visi pembangunan Kota Yogyakarta yang mendasarkan pada RPJMD Tahun 2017 - 2022 yaitu **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”**.

Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 mengakomodir program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridor pembangunan tahun 2022 diarahkan pada tema **“Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Berbasis Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, maka Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan dan mengampu pekerjaan dari sebagian kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Mendasarkan pada tema RKPD Tahun 2022, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah;
3. Peningkatan Perekonomian; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

1. Kemiskinan masyarakat menurun;
2. Keberdayaan masyarakat meningkat;
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
7. Kualitas pendidikan meningkat;
8. Harapan hidup masyarakat meningkat;
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat;
11. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
12. Infrastruktur wilayah meningkat; dan
13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*KundhaNiti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5339);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2022 ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2022.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada dalam Renja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2022.

## **1.4 Sistematika**

Sistematika Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2022, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berisi pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, proses penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, keterkaitan antara Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dengan dokumen lainnya, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang peraturan – peraturan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, serta garis besar isi dokumen.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian tentang proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta alasannya dan penjelasan apabila terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat hasil telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi hasil perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi uraian mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana indikatif, serta uraian penjelasan yang diperlukan apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan, output, dan outcome yang diinginkan.

### BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting, yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta telah mengalami beberapa kali penyesuaian mengikuti dinamika kebijakan maupun tuntutan kinerja yang harus dipenuhi.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan review Renstra menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal tersebut berimplikasi pada penyesuaian/perubahan nomenklatur program/kegiatan beserta perubahan target Renstra 2017-2022.

Pada Tahun 2021 kembali dilaksanakan review Renstra terhadap indikator dan target pada beberapa program yang disebabkan:

- a. Perubahan metadata target yang akan dicapai pada akhir masa Renstra, yaitu pada indikator program 1) Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah dan 2) Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot. Hal tersebut berimbas pada adanya target indikator program yang justru turun di tahun 2021 jika dibandingkan dengan target/capaian sebelumnya.
- b. Kegiatan yang pelaksanaannya di tahun 2022 dialihkan sumber pendanaannya dari APBD ke Dana Keistimewaan. Program yang bersumber dari Dana Keistimewaan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tidak memiliki indikator program dan target tersendiri, sehingga indikator program dan target terkait kegiatan yang dialihkan yaitu Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar Kecamatan dan antar Kelurahan, ditiadakan di tahun 2022.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-			
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	88,48%	72%	74,18%	74,18%	100%	78,64%	
				Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	75,45%	56,5%	57%	57%	100%	62,25%	
1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							
1	03	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota							
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
2	10	02		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penerbitan Izin Lokasi	100%	-	-	-	100%	
2	10	02	2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Keberatan terhadap Permasalahan Tanah di Kota Yogyakarta	100%	-	-	-	100%		
2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	100%	95,53%	96,12%	96,12%	100%	99,02%	
2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2	10	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	100%	96,11%	96,93%	96,93%	100%	79,76%	
2	10	08	2.01	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong								
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan	-	-	-	-	93,33%		
					Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.	100%	-	-	-	75%		
2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	10	11		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-
2	10	11	2.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta mulai tahun 2020 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah sesuai Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)**  
**Kota Yogyakarta**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)
<b>I</b>	<b>Indikator Sasaran :</b>											
1	Indeks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang.			65.59	70.45	81.97	82,69	65.59		81.97	82,69	
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan			96.65	97.73	100	100	96.65		100	100	
<b>II</b>	<b>Indikator Program :</b>											
1	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang			74.18%	78,64%	88.48%	90,18%	74.18%		88.48%	90,18%	
2	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang			57.00%	62,25%	75.45%	75,20%	57.00%		75.45%	75,20%	
3	Persentase Penerbitan Izin Lokasi			-	-	100%	100%	-		100%	100%	
4	Persentase Penanganan Keberatan terhadap Permasalahan Tanah di Kota Yogyakarta			-	-	100%	100%	-		100%	100%	
5	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah			96,12%	99,02%	100%	100%	96,12%		100%	100%	
6	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.			96.89%	79,76%	100%	100%	96.89%		100%	100%	
7	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.			-	75.00%	100%	100%	-		100%	100%	
8	Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar Kecamatan dan antar Kelurahan			-	93,33%	-	-	-		-	-	

### 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perkembangan kota merupakan sebuah proses dinamis yang membawa baik dampak positif maupun negatif. Perkembangan positif akan membawa sebuah kota dapat menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk berkehidupan, sebaliknya maka akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali. Karena itulah penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Sebuah kota diharapkan dapat memenuhi kondisi (1) kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan dapat terjaga, (2) sarana prasarana perkotaan memadai, (3) kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta (4) standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat. pada kenyataannya perkembangan sebuah kota masih harus mengurai berbagai permasalahan dan isu strategis tata ruang dan lingkungan, diantaranya meliputi :

- a. Kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga,
- b. Sarana prasarana perkotaan kurang memadai,
- c. Kelancaran perhubungan dan lalulintas,
- d. Standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat
- e. rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai,
- f. kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat rendah/kurangnya atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, dan kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah atau kurangnya fungsi lindung kawasan sempadan sungai merupakan indikasi dari pengendalian pemanfaatan ruang kota yang kurang optimal

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan terhadap beberapa aturan yang terkait tata ruang. Kebijakan keberpihakan dari Pemerintah untuk mendorong kegiatan berusaha dan kemudahan perizinannya menjadikan adanya beberapa perubahan terhadap aturan-aturan terkait tata ruang. Dalam PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merubah PP Nomor 15 tahun 2010, penyelenggaraan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:



- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang atau Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dimaksudkan untuk:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota.
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota.
- c. Apabila luas ruang terbuka hijau, memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Sesuai UUCK, maka dalam PP terbaru tersebut, Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Sedangkan Pengendalian Pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
- b. penilaian perwujudan RTR;
- c. pemberian insentif dan disinsentif;
- d. pengenaan sanksi; dan
- e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
- b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; dan

- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan penataan ruang diselenggarakan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang; dan
- b. peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah yang ada. Kondisi umum daerah secara makro yang diinginkan atau diproyeksikan ke depan pada akhir Pembangunan Jangka Menengah yaitu pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	81,97%
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100%

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melalui program dan kegiatan yang disusun Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta dengan partisipasi berbagai pihak, pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang yang diinginkan sebagai Sasaran Pembangunan Daerah:

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82,50%

Proses pelaksanaan peningkatan sarana prasarana pada akhir Renstra diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata ruang secara optimal, termasuk penyusunan hubungan input, proses dengan output/outcomes.

Perbandingan antara RKPD 2022 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta disajikan dalam Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Tahun 2022

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat</b>	<b>A (Nilai &gt;80 s.d 90)</b>	<b>6.304.478.369</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat</b>	<b>A (Nilai &gt;80 s.d 90)</b>	<b>6.304.478.369</b>	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	23.570.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	23.570.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.404.621.312	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.404.621.312	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	248.735.714	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	248.735.714	
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	149.014.887	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	149.014.887	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	176.496.256	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	176.496.256	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	302.040.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Yogyakarta	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	302.040.200	
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang</b>	<b>88,48%</b>	<b>2.195.535.200</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang</b>	<b>88,48%</b>	<b>2.195.535.200</b>	
			<b>Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang</b>	<b>75,45%</b>				<b>Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang</b>	<b>75,45%</b>		
2.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	488.399.120	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	488.399.120	
2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota	100%	869.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota	100%	869.500.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi	100%	590.953.040	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi	100%	590.953.040	
2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Kota Yogyakarta	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	246.683.040	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Kota Yogyakarta	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	246.683.040	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>		<b>Persentase Penerbitan Izin Lokasi</b>	<b>100%</b>	<b>8.050.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>		<b>Persentase Penerbitan Izin Lokasi</b>	<b>100%</b>	<b>8.050.000</b>	
3.1	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengendalian Pertanahan	100%	8.050.000	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengendalian Pertanahan	100%	8.050.000	
4	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>		<b>Persentase Penanganan Keberatan terhadap Permasalahan Tanah di Kota Yogyakarta</b>	<b>100%</b>	<b>193.140.000</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>		<b>Persentase Penanganan Keberatan terhadap Permasalahan Tanah di Kota Yogyakarta</b>	<b>100%</b>	<b>193.140.000</b>	
4.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Kejelasan status hukum pertanahan	100%	193.140.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Kejelasan status hukum pertanahan	100%	193.140.000	
5	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah</b>	<b>100%</b>	<b>1.172.697.964</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah</b>	<b>100%</b>	<b>1.172.697.964</b>	
5.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Bertambahnya aset/ fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta	100%	1.172.697.964	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Bertambahnya aset/ fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta	100%	1.172.697.964	
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>		<b>Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot</b>	<b>100%</b>	<b>1.259.925.618</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>		<b>Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot</b>	<b>100%</b>	<b>1.259.925.618</b>	
6.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Yogyakarta	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	100%	1.259.925.618	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Yogyakarta	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	100%	1.259.925.618	
7	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		<b>Presentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.</b>	<b>100%</b>	<b>64.904.000</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>		<b>Presentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.</b>	<b>100%</b>	<b>64.904.000</b>	
7.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	100%	64.904.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	100%	64.904.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>				<b>1.503.600.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>				<b>1.503.600.000</b>		
8.1	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta			1.503.600.000	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kota Yogyakarta			1.503.600.000		
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>12.702.331.151</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>12.702.331.151</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2022**  
**Kota Yogyakarta**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Pengelolaan Tanah Kosong</b>				
	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kel. Purbayan	Pelacakan dan identifikasi tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta di Wilayah Kota	1 bidang	
		Kel. Umbulharjo		1 bidang	
		Kel. Bausasran		-	

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2022 telah melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, tetapi selaku Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah tidak hanya menampung hasil Musrenbang Kecamatan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Beberapa kebijakan nasional dalam pengimplementasiannya di daerah tidak hanya terkait dukungan dan ketepatan terhadap prioritas sasaran, namun termasuk sumber daya, tenaga, dan sarana prasarana yang mencukupi. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, sesuai Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwal) yang mengaturnya, berkewajiban dan masuk dalam mata rantai agar kebijakan nasional dan kebijakan regional Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercapai dengan baik.

Pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Undang-undang ini merevisi berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah dalam rangka kemudahan berusaha. Urusan tata ruang juga mendapatkan dampak dari aturan yang baru tersebut, sehingga muncul berbagai revisi terhadap perundangan serta peraturan teknis dan pelaksanaannya. Di lain pihak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan memberikan amanah dalam dua bidang yang diampu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta yaitu Pertanahan dan Tata Ruang. Hal ini membutuhkan pemenuhan sarana prasarana kerja dalam produktifitas kerja, sumber daya aparat pemerintahan sangatlah penting pengaruh dan perannya dalam pencapaiannya.

Pada akhirnya kebijakan nasional dapat tercapai apabila didukung oleh kebijakan dan pelaksanaan pada tingkat regional dan lokal yang baik, terstruktur dan sistematis.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta:

1. Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang yang semakin tinggi.
2. Administrasi pertanahan yang semakin tertib.



### 3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta adalah :

1. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan.
2. Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

#### 3.3.2 Rencana Indikator Kinerja Tahunan 2022

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya prioritas Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dan Pematapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi disusun Rencana Kinerja Tahunan 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkatkan	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang	81,97 %
2.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkatkan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	100 %

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota

Yogyakarta merencanakan program dan kegiatan tahun 2022. Program kegiatan dimaksud terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; terdiri dari :
  - a. Kegiatan Perencanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; terdiri dari :
  - a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Rinci (RTRR)
  - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Izin Lokasi; terdiri dari Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; terdiri dari Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; terdiri dari Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong; terdiri dari Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.
7. Program Penatagunaan Tanah; terdiri dari Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.702.313.151,- yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat nama Urusan, Program dan Sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022. Penetapan indikator kinerja dan target mengacu pada Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan serta Review Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Tabel 4.1  
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
1	03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										8,500,013,569	9,365,897,854				
1	03	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										6,304,478,369	6,960,775,134			
1	03	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										23,570,000	25,927,000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen 1 Berita Acara	100 %	4,560,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5,016,000
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	3,300,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,630,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Dokumen 3 Dokumen 12 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen	100 %	13,090,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	14,399,000
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	2,620,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,882,000
1	03	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										5,404,621,312	5,945,083,443		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	38 ASN	100 %	5,359,658,272		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5,895,624,099
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	1,200,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,320,000
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	3,000,000		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,300,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	100 %	31,853,040			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	35,038,344
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	1,225,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,347,500
1 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 Dokumen	100 %	1,850,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2,035,000
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Sementara	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	100 %	5,400,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5,940,000
1 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	435,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	478,500
<b>1 03 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>248,735,714</b>					<b>281,655,912</b>
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Jenis	100 %	9,095,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	11,811,250
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	52 Jenis	100 %	20,900,714			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	29,615,662
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang Cetak dan Penggandaan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	5 Jenis 50000 Lembar	100 %	49,200,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	54,175,000
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku Surat Kabar selama 12 bulan	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	16 Buku 2 Jenis	100 %	5,565,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6,121,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam DIY) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3025 os 4 Kali 8 Kali 3 Kali	100 %	163,975,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	179,932,500
<b>1 03 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>149,014,887</b>					<b>156,196,147</b>
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dispenser Eksternal hardisk Flashdisk GPS Jam dinding Kamera Komputer Kursi Susun Laptop Meja Biro Mouse wireless Printer Scanner UPS Vertical blind	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Buah 6 Buah 20 Buah 1 Unit 10 Buah 1 Unit 3 Unit 10 Buah 1 Unit 2 Buah 29 Buah 6 Unit 3 Unit 2 Unit 9 m2	100 %	149,014,887			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	156,196,147
<b>1 03 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>176,496,256</b>					<b>194,148,632</b>
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Bank Materai Pengiriman dokumen Surat Keluar Surat Masuk	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	71 Kali 650 Lembar 20 Dokumen 10000 Surat 13000 Surat	100 %	7,061,500			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	7,770,400
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Rekening Telepon	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan	100 %	4,200,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4,620,000
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jasa Kebersihan Kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan	100 %	165,234,756			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	181,758,232
<b>1 03 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>302,040,200</b>					<b>357,764,000</b>
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan Roda 2 Pemeliharaan kendaraan Roda 4	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	11 Unit 5 Unit 11 Unit 5 Unit	100 %	138,230,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	172,491,000
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	AC Split Kamera Laptop Pompa Air	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan,	A (Nilai >80 s.d 90)	14 Unit 1 Unit 10 Unit 1 Unit	100 %	39,810,200			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	48,873,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Printer Sepeda Toner		Semua Kelurahan		6 Unit 2 Unit 7 Jenis							
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gedung Kantor Dispartaru	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Lokasi	100 %	124,000,000			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	136,400,000
<b>1 03 12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>								<b>2,195,535,200</b>					<b>2,405,122,720</b>
<b>1 03 12 2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>								<b>488,399,120</b>					<b>537,239,032</b>
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Penyempurnaan Draft Perwal Pengaturan Ruang Bawah Bumi Penyempurnaan Draft Perwal RTBL Kawasan Mangkubumi - Jl. Margo Utomo	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,48%;75,45 % -	1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	266,106,080			Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	88,48%;75,45 % -	292,716,688
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Pembinaan Penataan Ruang Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,48%;75,45 % -	1 Dokumen 750 Dokumen	100 %	222,293,040			Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	88,48%;75,45 % -	244,522,344
<b>1 03 12 2.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>869,500,000</b>					<b>956,450,000</b>
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Kajian Pengaturan Pemanfaatan Ruang Atas Bumi Rancangan Peraturan Walikota Petunjuk Teknis RDTR Kota Yogyakarta Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Jl. Magelang	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,48%;75,45 % -	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	764,850,000			Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	88,48%;75,45 % -	841,335,000
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Kajian Tata Ruang Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif di Kota Yogyakarta	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,48%;75,45 % -	1 Dokumen	100 %	104,650,000			Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	88,48%;75,45 % -	115,115,000
<b>1 03 12 2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>590,953,040</b>					<b>650,048,344</b>
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,48%;75,45 % -	1 Dokumen	100 %	336,303,040			Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	88,48%;75,45 % -	369,933,344
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Pengembangan Sistem Aplikasi SITARU dan Geospasial	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,48%;75,45 % -	1 Dokumen	100 %	254,650,000			Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	88,48%;75,45 % -	280,115,000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>1 03 12 2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi</b>	<b>Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>246,683,040</b>			<b>261,385,344</b>	
1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Pemberian Insentif Disinsentif Bidang Penataan Ruang Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,48%;75,45 % -	1 Dokumen 1 Dokumen	100 %		40,580,000		Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	88,48%;75,45 % -	33,088,000
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Audit Tata Ruang Penyusunan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,48%;75,45 % -	1 Dokumen 1 Dokumen	100 %		137,180,000		Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	88,48%;75,45 % -	152,482,000
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,48%;75,45 % -	1 Dokumen	100 %		68,923,040		Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang; Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	88,48%;75,45 % -	75,815,344
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>2 10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>									<b>4,202,317,582</b>			<b>4,621,068,621</b>	
<b>2 10 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>									<b>8,050,000</b>			<b>8,855,000</b>	
<b>2 10 02 2.01</b>	<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>8,050,000</b>			<b>8,855,000</b>	
2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase penerbitan Izin Lokasi	Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	Terwujudnya Tertib Administrasi Pengendalian Pertanahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %		8,050,000		Persentase penerbitan Izin Lokasi	100 %	8,855,000
<b>2 10 04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>									<b>193,140,000</b>			<b>210,973,125</b>	
<b>2 10 04 2.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>193,140,000</b>			<b>210,973,125</b>	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta	Kajian Potensi Konflik Pertanahan Penanganan Permasalahan Pertanahan	Kejelasan status hukum pertanahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	100 %		193,140,000		Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta	100 %	210,973,125
<b>2 10 05</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>									<b>1,172,697,964</b>			<b>1,289,967,800</b>	
<b>2 10 05 2.01</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>1,172,697,964</b>			<b>1,289,967,800</b>	
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pengadaan tanah untuk RTHP Kelurahan Prawirodirjan	Bertambahnya aset/ fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen 1 Lokasi	100 %		1,172,697,964		Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	100 %	1,289,967,800
<b>2 10 08</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>									<b>1,259,925,618</b>			<b>1,385,918,296</b>	
<b>2 10 08 2.02</b>	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>									<b>1,259,925,618</b>			<b>1,385,918,296</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pembuatan/perubahan peta bidang Persil untuk Fasilitas Umum (fasum) di Wilayah Kota Yogyakarta. Pelacakan dan identifikasi tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta Pendaftaran Pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Yogyakarta non jalan di wilayah Kota Yogyakarta Pendaftaran Pensertifikatan jalan milik Pemerintah Kota Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakarta Pendaftaran Permohonan Pembuatan SKT di Wilayah Kota Yogyakarta. Pengurusan Permohonan baru atau perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwon Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Bidang 1 Dokumen 5 Bidang 265 Bidang Ruas Jalan 10 Bidang 25 Bidang	100 %	1,259,925,618			Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	100 %	1,385,918,296
<b>2 10 10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>							<b>64,904,000</b>						<b>71,394,400</b>
<b>2 10 10 2.01</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>64,904,000</b>						<b>71,394,400</b>
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Presentase Kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Pertanahan Penyelesaian Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Lokasi 10 Rekomendasi	100 %	64,904,000			Presentase Kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara.	100 %	71,394,400
<b>2 10 11</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>							<b>1,503,600,000</b>						<b>1,653,960,000</b>
<b>2 10 11 2.01</b>	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>							<b>1,503,600,000</b>						<b>1,653,960,000</b>
2 10 11 2.01 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-	Hasil identifikasi 50 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di kota yogyakarta. Penegasan 10 batas Kelurahan : Pembuatan Peta Batas Kelurahan, Berita Acara Kesepakatan, Pembuatan Pilar Batas Kelurahan, Pemasangan Pilar Batas Kelurahan Tanda Identitas berupa Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta Terdaftarkannya 75 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Badan Pertanahan Nasional	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Terwujudnya kejelasan batas wilayah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	1 Dokumen 125 Pathok 110 Papan Nama 1 Dokumen	100 %	1,053,550,000			-	--	1,158,905,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kota Yogyakarta  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 10 11 2.01 08	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	-	300 Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Terwujudnya kejelasan batas wilayah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- -	100 %	100 %	305,500,000		-	- -	336,050,000	
2 10 11 2.01 09	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	-	Fasilitasi penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta; Terwujudnya kejelasan batas wilayah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- -	1 Dokumen	100 %	144,550,000		-	- -	159,005,000	
<b>TOTAL</b>									<b>12,702,331,151</b>				<b>13,986,966,475</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta sebagai bahan penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD dan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 serta untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan bersinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta, 2022  
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
(*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)  
Kota Yogyakarta

Wahyu Handoyo Hardjono Putro, ST., MA., MTP  
NIP. 19720411 199803 1 007

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

**MENYEPAKATI**

**I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:**

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	✓		
	1.1. Latar Belakang	✓		
	1.2. Landasan Hukum	✓		
	1.3. Maksud dan Tujuan	✓		
	1.4 Sistematika Penulisan	✓		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	✓		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	✓		
	Tabel 2.1	✓		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	✓		
	Tabel 2.2	✓		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	✓		
	Tabel 2.3	✓		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	✓		
	Tabel 2.4	✓		
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	✓		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	✓		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	✓		
	3.3. Program dan Kegiatan	✓		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	✓		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	✓		
5	BAB V. PENUTUP	✓		

**II. Hal-hal Penting untuk Dicermati**

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	✓		
2.	Tolok ukur rigid	✓		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan		✓	mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.235.411.387,-

	Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021			
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	✓		
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output	✓		
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	✓		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		✓	Tidak ada
8.	Mengacu SPM dan SDG's	✓		
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah	✓		
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		✓	Tidak ada
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	✓		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		✓	Tidak ada
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	✓		
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan	✓		
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	✓		
16.	Pengawasan GAP/GBS	✓		
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke <a href="http://bit.ly/ProsesRenja2022">bit.ly/ProsesRenja2022</a>	✓		
18.	<p>CATATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 26.400.873.322,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.235.411.387,- dari Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 17.165.461.935,-.</li> <li>Mohon menentukan skala prioritas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Tahun 2022 mengingat kondisi keuangan daerah yang belum stabil.</li> <li>Akomodasi Pokir untuk pengadaan tanah Fasum di Gunung Ketur</li> <li>Rencana mengusulkan Indikator Program untuk DAIS karena untuk kegiatan Penegasan Batas Wilayah yang semula dianggarkan di APBD akan diusulkan menggunakan DAIS (Indikator Program Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan)</li> <li>Pegabungan Ouput Pengurusan Permohonan baru Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Ouput Pengurusan Permohonan perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat</li> <li>Adanya Perbedaan pada Kegiatan untuk Program Keistimewaan Urusan Pertanahan antara SIPD dengan KEPMEN 050-3708/2020.</li> <li>Untuk Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dan Sub Kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa menurut KEPMEN 050-3708/2020 terdapat di Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</li> <li>Revisi Target Ouput Fasilitasi penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta dari "100%" menjadi "1 Dokumen"</li> <li>Lokus Kajian Potensi Konflik Pertanahan berdasarkan kelurahan, karena setiap wilayah memiliki potensi konflik yang berbeda – beda</li> <li>Revisi Target Output Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari "5 dokumen" menjadi "1 Dokumen"</li> <li>Draft Perwal Pengaturan Ruang Bawah Bumi Penyempurnaan Draft merupakan amanat RDTR, Kajian dilaksanakan pada tahun 2021</li> </ol>			

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>12. Kajian RTBL jalan Magelang dilaksanakan pada tahun 2016 oleh Kimpraswil Kota Yogyakarta, kemudian dilimpahkan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sehingga diperlukan Review RTBL.</li><li>13. Pada tahun 2021 untuk Aplikasi SITARU akan mencakup hingga 14 kecamatan, sampai saat ini baru mencakup 7 kecamatan, pada tahun 2022 untuk penyempurnaan atribut dan konten pengembangan</li><li>14. pemeliharaan Ruang Display untuk hasil kegiatan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan pemeliharaan Ruang Kerja di lantai 2 sayap selatan</li><li>15. Kajian <i>Green Transportation Infrastructure</i> , fokus pada kajian penyediaan sistem, jaringan dan infrastruktur Green Transportation (non motorized) pada Struktur Ruang Kota Yogyakarta</li></ol> |
|--|

III. Review Renstra

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
		1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	78,64%	88,48%	1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	78,64%	88,48%
PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang					Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	62,25%	75,45%					Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	62,25%	75,45%
		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				

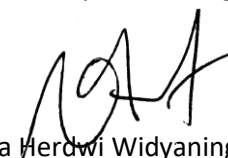


		2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
		2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase penerbitan Izin Lokasi	100%	100%	2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase penerbitan Izin Lokasi	100%	100%
		2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta	100%	100%	2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta	100%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan	3	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan	96,70%	100,00%	2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan	99,02%	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	98,26%	100,00%	2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	79,76%	100,00%
		2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan	93,33%	100,00%	2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan	93,33%	-
						Persentase Kejelasan Status Pergunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.	75,00%	100,00%					Persentase Kejelasan Status Pergunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.	75,00%	100,00%

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

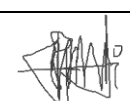
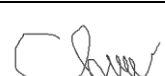


Yogyakarta, 31 Maret 2021

Pimpinan Sidang

  
Maria Herdwi Widyaningsih, S.T.  
NIP. 19780503 201001 2 008

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Yohanna Purnomo Sari, ST. M.Eng.	Inspektorat Kota Yogyakarta	
2.	Charina Permatasari	BPKAD Kota Yogyakarta	
3.	RR Dwi Turistiyosari	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	
4.	Hendra Gunawan, S.T.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	
5.			
6.			
7.	.... Dst		